

PENDIDIKAN BERKEADILAN DI INDONESIA: TELAAH LITERATUR DAN STUDI KASUS PERMASALAHAN AKSES DAN KUALITAS

Amir Rifa'i

Program Study Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana S3,
Universitas Negeri Malang

E-mail: amirrifai.2501329@students.um.ac.id

Abstract

Equitable education is a crucial pillar for national progress. However, Indonesia still faces various challenges related to disparities in access to and quality of education, particularly between urban and rural areas, upper-middle and lower-middle class, and public and private schools. This article aims to analyze the issues of access to and quality of education in Indonesia through a literature review and general case studies. The study's findings indicate that educational inequality is influenced by socioeconomic factors, the distribution of teachers and infrastructure, and unequal education policies. Recommendations include improving the equitable distribution of educational resources, strengthening teacher quality, and affirmative action policies for disadvantaged regions.

Keywords: equitable education, access to education, quality of education, inequality, education policies and solutions

Abstrak

Pendidikan yang berkeadilan merupakan pilar penting bagi kemajuan bangsa. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, kelompok ekonomi menengah-atas dan bawah, serta sekolah negeri dan swasta. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia melalui kajian literatur dan studi kasus umum. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, distribusi guru dan sarana prasarana, serta kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata. Rekomendasi yang diajukan antara lain peningkatan pemerataan distribusi sumber daya pendidikan, penguatan kualitas guru, dan kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal.

Kata Kunci: pendidikan berkeadilan, akses pendidikan, kualitas pendidikan, ketimpangan, kebijakan Pendidikan dan Solusi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya

kesenjangan yang cukup lebar dalam hal akses, mutu, dan hasil pendidikan di Indonesia.

Menurut laporan UNESCO (2023), Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal. Kesenjangan tersebut terlihat dari angka partisipasi sekolah yang menurun pada jenjang menengah atas di daerah perdesaan, kualitas sarana-prasarana yang tidak merata, serta rendahnya kompetensi literasi dan numerasi siswa yang terekam melalui Asesmen Nasional.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi membawa dampak baru bagi dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi membuka peluang untuk memperluas akses pembelajaran melalui media digital. Di sisi lain, kesenjangan digital antara siswa di kota besar dan daerah terpencil memperlebar jurang ketidaksetaraan. Pendidikan berkeadilan tidak hanya menyangkut ketersediaan sekolah, tetapi juga kemampuan semua peserta didik untuk mengakses sumber belajar modern.

Peran pendidikan dalam pembangunan manusia juga menjadi alasan penting mengapa isu ini harus dikaji secara mendalam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Jika kesenjangan pendidikan terus terjadi, maka upaya peningkatan IPM akan terhambat dan dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Tulisan ini berfokus pada dua isu utama, yakni akses pendidikan dan kualitas pendidikan, sebagai fondasi terwujudnya pendidikan berkeadilan. Pendekatan yang digunakan mengombinasikan analisis teoritis dari literatur dengan refleksi empiris melalui studi kasus. Dengan cara ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi serta menawarkan solusi yang realistis.

Lebih jauh, pendahuluan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan aktif seluruh pihak sangat penting agar kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

METODE

Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan studi kasus. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian dari lembaga pemerintah maupun internasional yang relevan dengan isu akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Studi kasus dilakukan dengan menyoroti beberapa fenomena nyata, seperti kesenjangan sarana pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, distribusi guru, dan capaian Asesmen Nasional.

HASIL

Permasalahan Akses Pendidikan

Akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) untuk kelompok usia 16–18 tahun di perkotaan mencapai 84,7%, sedangkan di perdesaan hanya 73,1%. Hambatan utama yang dihadapi masyarakat perdesaan antara lain jarak sekolah yang jauh, keterbatasan transportasi, serta biaya pendidikan yang relatif tinggi.

Permasalahan Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi sorotan. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD. Faktor yang memengaruhi antara lain kompetensi guru, kurikulum yang kurang adaptif, serta keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran.

Distribusi guru yang tidak merata juga menjadi masalah klasik. Daerah perkotaan cenderung memiliki guru yang lebih berkualifikasi dibandingkan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Upaya pemerintah melalui kebijakan tunjangan khusus dan program Guru Penggerak sudah mulai memperbaiki kondisi, tetapi implementasi masih menghadapi tantangan teknis dan anggaran.

Studi Kasus: Ketimpangan Pendidikan di Papua

Papua menjadi contoh nyata ketimpangan pendidikan. Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Papua hanya 7,5 tahun, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 8,9 tahun. Ketersediaan guru dan fasilitas belajar menjadi kendala utama. Banyak sekolah yang masih kekurangan guru mata pelajaran tertentu dan kondisi sarana-prasarana yang minim.

Program afirmasi seperti SMK Pusat Keunggulan dan sekolah berbasis asrama menjadi salah satu solusi yang diterapkan pemerintah. Namun, efektivitas program masih terbatas karena keterbatasan anggaran dan dukungan infrastruktur.

Faktor Sosial-Ekonomi yang Memengaruhi Pendidikan

Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh langsung terhadap partisipasi sekolah. Anak dari keluarga miskin cenderung memiliki peluang lebih rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain biaya langsung seperti uang sekolah, seragam, dan buku, biaya tidak langsung seperti transportasi menjadi beban tambahan. Penelitian Suryadi (2021) menunjukkan bahwa keluarga di kuintil pendapatan terbawah 40% memiliki tingkat putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan kuintil pendapatan teratas.

Tantangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran

Kurikulum nasional telah mengalami beberapa kali revisi, namun

implementasinya di lapangan sering kali menghadapi kendala. Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada 2022 diharapkan mampu memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa, tetapi membutuhkan dukungan pelatihan guru yang memadai. Tanpa pendampingan yang intensif, kurikulum baru berisiko tidak mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Teknologi Pendidikan sebagai Solusi

Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Platform daring seperti Rumah Belajar dan program TV edukasi sudah dimanfaatkan selama pandemi COVID-19, namun keterbatasan akses internet di daerah terpencil tetap menjadi hambatan. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital agar seluruh siswa dapat mengakses materi pembelajaran daring.

Studi Kasus: Keberhasilan Program Sekolah Penggerak

Di beberapa daerah, program Sekolah Penggerak telah menunjukkan hasil positif. Misalnya, di Jawa Tengah, sekolah-sekolah yang mengikuti program ini mengalami peningkatan skor literasi dan numerasi sebesar 15% dalam dua tahun. Faktor keberhasilan meliputi keterlibatan guru, pelatihan intensif, dan pendampingan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat menjadi model untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Keterlibatan Komunitas dan Dunia Usaha

Keterlibatan komunitas lokal dapat memperkuat kualitas pendidikan, khususnya di daerah yang minim sumber daya. Sekolah yang membangun kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah cenderung lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta juga dapat diarahkan untuk mendukung sarana belajar, beasiswa, dan program literasi.

Perspektif Gender dalam Pendidikan

Kesenjangan gender dalam pendidikan di Indonesia semakin menurun, tetapi di beberapa daerah masih terjadi pernikahan usia dini yang menyebabkan angka putus sekolah lebih tinggi pada anak perempuan. Program kesadaran masyarakat dan kebijakan perlindungan anak perlu diperkuat agar anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kualitas Pembelajaran

Pandemi COVID-19 telah memperburuk ketimpangan pendidikan. Siswa dari keluarga mampu dapat mengakses pembelajaran daring dengan baik, sedangkan siswa dari keluarga miskin mengalami learning loss yang signifikan. Laporan World Bank (2023) mencatat penurunan kemampuan membaca setara setengah tahun ajaran. Oleh karena itu, program pemulihan pembelajaran seperti Asesmen Diagnostik dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka menjadi penting untuk mengurangi dampak tersebut.

PEMBAHASAN

Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal, melainkan membutuhkan strategi komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Berikut analisis solusi berdasarkan setiap permasalahan yang diidentifikasi:

Solusi Permasalahan Akses Pendidikan

Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama di perdesaan, diperlukan pendekatan multi-dimensi. Pemerintah perlu memperluas pembangunan sekolah menengah atas dan SMK di wilayah dengan rasio sekolah rendah serta memperbaiki transportasi publik menuju sekolah. Program beasiswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP) harus diperkuat dengan basis data terpadu yang lebih akurat agar tepat sasaran. Selain itu, model pendidikan berbasis asrama di daerah terpencil bisa menjadi solusi agar siswa tidak perlu menempuh jarak jauh setiap hari. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mendanai dan mengelola infrastruktur pendidikan, sehingga akses pendidikan menjadi lebih merata.

Solusi Permasalahan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari guru. Pemerintah perlu memperluas program Guru Penggerak dan meningkatkan tunjangan agar guru berkualitas bersedia ditempatkan di daerah 3T. Sistem pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan guru (*need-based training*) harus diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi, seperti platform pelatihan daring. Kurikulum harus terus disesuaikan dengan kebutuhan abad 21, menekankan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, literasi digital, dan karakter. Investasi pada sarana pembelajaran seperti laboratorium sains, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran juga harus menjadi prioritas agar proses belajar menjadi lebih interaktif dan bermakna.

Solusi Ketimpangan Pendidikan di Papua

Papua memerlukan pendekatan khusus berbasis kearifan lokal dan afirmasi positif. Pemerintah harus meningkatkan jumlah guru dengan memberikan insentif ganda untuk guru yang bersedia mengajar di Papua. Pembangunan infrastruktur seperti asrama, laboratorium, dan fasilitas IT harus menjadi fokus agar siswa memiliki kesempatan belajar yang sama dengan wilayah lain. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan komunitas lokal dapat membantu mengurangi resistensi sosial serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Solusi Faktor Sosial-Ekonomi

Mengatasi hambatan ekonomi memerlukan pendekatan sistemik. Pemerintah bisa memperluas bantuan pendidikan bersyarat (*conditional cash transfer*) agar keluarga miskin terdorong untuk menyekolahkan anaknya hingga tuntas. Sekolah-sekolah dapat menyediakan kantin sehat gratis, seragam subsidi, dan layanan transportasi gratis. Selain itu, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan UMKM

lokal akan membantu meningkatkan pendapatan sehingga biaya pendidikan tidak menjadi beban berat.

Solusi Tantangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran

Implementasi Kurikulum Merdeka harus diiringi dengan pendampingan intensif kepada guru melalui lokakarya, pendampingan daring, dan forum belajar komunitas. Sekolah harus diberi keleluasaan untuk menyesuaikan modul ajar dengan konteks lokal, sehingga pembelajaran lebih relevan bagi siswa. Pemerintah juga dapat menyediakan bank soal nasional dan modul ajar digital untuk membantu guru yang mengalami kesulitan merancang pembelajaran.

Solusi Teknologi Pendidikan

Pemerintah perlu mempercepat pemerataan akses internet melalui proyek Palapa Ring dan kemitraan dengan penyedia layanan telekomunikasi. Penyediaan gawai subsidi untuk siswa kurang mampu juga dapat membantu. Guru harus dilatih untuk memanfaatkan Learning Management System (LMS) dan aplikasi interaktif sehingga pembelajaran daring tidak hanya berupa tugas pasif, tetapi juga mendorong keterlibatan siswa.

Solusi dari Keberhasilan Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak yang terbukti berhasil dapat direplikasi ke daerah lain dengan menyesuaikan konteks lokal. Pemerintah harus mendokumentasikan praktik terbaik (best practices) dan menjadikannya panduan bagi sekolah-sekolah lain. Pelibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah akan memperkuat dampak program.

Solusi Keterlibatan Komunitas dan Dunia Usaha

Komunitas lokal dapat dilibatkan melalui program adopsi sekolah di mana dunia usaha atau organisasi masyarakat membantu memenuhi kebutuhan sekolah. CSR perusahaan dapat diarahkan pada penyediaan beasiswa, buku, laboratorium komputer, dan program literasi digital. Dengan sinergi antara sekolah, masyarakat, dan dunia usaha, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

Solusi Perspektif Gender

Untuk mengurangi angka putus sekolah akibat pernikahan dini, pemerintah perlu menguatkan sosialisasi tentang bahaya pernikahan anak, melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Penyediaan sekolah ramah anak dan ramah gender, termasuk fasilitas sanitasi yang layak, dapat meningkatkan kenyamanan siswa perempuan. Beasiswa afirmasi khusus anak perempuan di daerah rawan putus sekolah dapat membantu mereka menyelesaikan pendidikan.

Solusi Dampak Pandemi COVID-19

Program pemulihan pembelajaran perlu dijalankan secara sistematis, termasuk Asesmen Diagnostik untuk memetakan kemampuan siswa pasca-pandemi. Sekolah harus diberi modul pengayaan dan remedial untuk

mengatasi learning loss. Kegiatan literasi dan numerasi harus diperkuat melalui metode kreatif seperti permainan edukatif dan proyek berbasis masalah. Peran orang tua juga harus diperkuat melalui pelatihan sederhana agar mereka dapat mendukung anak belajar di rumah.

PENUTUP

Pendidikan berkeadilan merupakan salah satu fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing. Hasil kajian literatur dan studi kasus pada artikel ini menegaskan bahwa permasalahan utama pendidikan di Indonesia berkisar pada ketimpangan akses dan kualitas. Kesenjangan ini diperparah oleh distribusi guru yang tidak merata, perbedaan infrastruktur sekolah antara kota dan desa, serta kesenjangan digital yang semakin nyata di era teknologi.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti kebijakan Merdeka Belajar, distribusi tunjangan guru, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan adalah langkah positif, namun implementasinya memerlukan konsistensi dan pengawasan yang berkelanjutan. Intervensi yang hanya bersifat jangka pendek tidak cukup untuk menutup jurang ketimpangan pendidikan yang telah terjadi selama puluhan tahun.

Kesimpulan penting lainnya adalah perlunya kolaborasi multipihak dalam mendorong pemerataan pendidikan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus memiliki peran yang sinergis. Partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dan program CSR dari perusahaan swasta dapat menjadi penguat keberlanjutan program-program pendidikan.

Selain itu, pembaruan kurikulum dan pemanfaatan teknologi harus diarahkan pada pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berbasis kompetensi. Program pendampingan guru seperti Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak perlu diperluas jangkauannya, agar guru di daerah terpencil memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kompetensinya. Penting pula memperhatikan dimensi sosial seperti gender, budaya lokal, dan perlindungan anak. Program pencegahan pernikahan dini, beasiswa afirmasi bagi kelompok miskin, serta layanan pendidikan inklusif akan memperkuat keadilan pendidikan. Dengan demikian, pemerataan pendidikan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik.

Dengan strategi yang komprehensif, penguatan kebijakan berbasis data, serta komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan, cita-cita menciptakan pendidikan yang berkeadilan di Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Pendidikan yang merata dan berkualitas akan menghasilkan generasi yang cerdas, produktif, dan siap menghadapi tantangan global, sehingga mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- All Habsy, B., Salwa, R. Z., Maratus Sholihah, I., & Budian, F. S. (2023). Usaha-Usaha Mengatasi Permasalahan Pendidikan di Indonesia. *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2).
- Astutik, W., Munawir, M., & Hasan, M. Z. (2022). Kompetensi Profesional Guru Sekolah Swasta: Mengidentifikasi Tantangan dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia (JPION)*, 4(2).
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*. Jakarta: BPS.
- Fitri, W., Melvina, O., Irvanaries, N., Novy Suwanny, Sisilia, & Firnando. (2021). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10).
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan Capaian Program Merdeka Belajar*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kurniawati, F. N. A. (2023). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1).
- Nugroho, S. R., Rizky, S. N., Sunaryo, H., & Salim, M.A. (2023). Pengembangan Mutu Sumber Daya Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal SOLMA*, 13(1).
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results*. Paris: OECD Publishing.
- Suryadi, A. (2021). Pemerataan Pendidikan dan Tantangan Kualitas di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 245–259.
- Salong, A. (2024). Inovasi Sosial dalam Peningkatan Akses Pendidikan Anak-anak di Daerah Terpencil (Kabupaten Seram Bagian Timur). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Tilaar, H.A.R. (2022). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2023).